

**IDENTIFIKASI POTENSI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
SEBAGAI DASAR PROGRAM PENATAAN AKSES
REFORMA AGRARIA**

(Studi di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanian
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



Disusun Oleh:

ELSA NINDYA SASMITA

NIT. 22314055

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

This study aims to identify the types of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) developing in Sitimulyo Village, Piyungan Subdistrict, Bantul Regency, and to analyze their potential as the basis for the Agrarian Reform Access Arrangement Program. The study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews and documentation in the form of MSME data from Sitimulyo Village and the Bantul Regency Cooperatives, SMEs, Industry, and Trade Office for 2025. The results indicate that there are 891 MSMEs spread across four business sectors: production, culinary, trade, and services. The production and culinary sectors are the most dominant due to the availability of local resources, high market demand, and the continued growth of community economic activity. This business diversity indicates that Sitimulyo Village has significant local economic potential to support the implementation of agrarian reform-based community empowerment programs.

Based on the results of the business potential analysis that considers aspects of economic profit, number of business actors, ability to absorb labor, market opportunities, business sustainability, and their relationship to local potential, four businesses were recommended as the basis for the Agrarian Reform Access Arrangement Program, namely garment/tailoring, melinjo chips, bricks, and herbal medicine. The garment/tailoring business is the most superior business because it has the highest profit level, a large market, and large development opportunities. Meanwhile, the melinjo chips, bricks, and herbal medicine businesses have important contributions to the economy through the utilization of local resources, job creation, and the development of product added value. The development of these businesses can be carried out through strengthening the capacity of business actors, digital marketing, business legality assistance, institutional strengthening, and access to asset-based capital through the utilization of land certificates resulting from PTSL. Thus, MSMEs in Sitimulyo Village have the potential to become a key instrument in supporting the implementation of Agrarian Reform Access Arrangement and improving community welfare in a sustainable manner.

Keywords: MSMEs, Business Potential, Agrarian Reform Access Arrangement, Community Empowerment.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan	18
D. Manfaat	19
1. Manfaat Teoritis	19
2. Manfaat Praktis	19
E. Batasan Masalah	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kerangka Teoritis	27
1. Reforma Agraria	27
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	35
3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	36
4. Identifikasi Potensi Usaha	38
C. Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Format Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data	43
1. Jenis Data	43
2. Sumber Data	43
3. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Teknik Analisis Data	45
1. Mengumpulkan Data	46
2. Mereduksi Data	46
3. Penyajian Data	46
4. Penarikan Kesimpulan	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Kalurahan Sitimulyo	47
B. Data Kependudukan	49
1. Data Penduduk	49
2. Data Pendidikan	50
3. Data Pekerjaan	52

C. Dukungan dan Kebijakan Daerah.....	53
1. Desa Prima	53
2. Desa Preneur	55
BAB V IDENTIFIKASI JENIS USAHA KALURAHAN SITIMULYO	57
A. Gambaran Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kalurahan Sitimulyo	57
B. Identifikasi Jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kalurahan Sitimulyo	60
1. Sektor Jasa.....	61
2. Sektor Kuliner	63
3. Sektor Perdagangan.....	66
4. Sektor Produksi	68
BAB VI ANALISIS POTENSI USAHA KALURAHAN SITIMULYO	72
A. Kondisi Keseluruhan Potensi Usaha	72
B. Potensi Usaha.....	76
1. Usaha Batu Bata.....	76
2. Usaha Emping Melinjo.....	80
3. Usaha Jamu	83
4. Usaha Konveksi/Penjahit	87
C. Rekomendasi Usaha Unggulan	93
BAB VII PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan pertanahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata, salah satu bentuk nyata kebijakan tersebut adalah Program Reforma Agraria. Reforma Agraria merupakan proses penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Salim & Utami (2020), Reforma Agraria merupakan mandat konstitusi untuk menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum sekaligus menciptakan keadilan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset, tetapi juga penataan akses. Penataan aset dilakukan melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset guna memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat. Selanjutnya, penataan akses diarahkan untuk mendukung pemanfaatan aset tersebut melalui pemberian akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan produktivitas, seperti permodalan, teknologi, pasar, pelatihan, serta penguatan kelembagaan. Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya bertujuan memperbaiki struktur penguasaan tanah, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

Dari segi penataan aset, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu bagian dari legalitas aset dalam pelaksanaan Reforma Agraria. PTSL adalah program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang bertujuan mewujudkan pendaftaran tanah secara lengkap melalui pengumpulan data fisik dan yuridis secara sistematis pada seluruh objek tanah. Produk utama PTSL berupa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai legalitas formal atas aset tanah, menciptakan kepastian hukum, dan menjadi dasar penyusunan administrasi pertanahan yang tertib (Hermawan & Surata, 2021).

Namun demikian, PTSL tidak hanya berorientasi pada penerbitan sertifikat tanah, tetapi juga sebagai prasyarat utama pelaksanaan penataan akses. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, ditegaskan bahwa penataan aset yang berasal dari PTSL dapat menjadi dasar Program Penataan Akses Reforma Agraria. Dengan demikian, sertifikat hak atas tanah dari program PTSL dapat dimanfaatkan sebagai modal awal dalam pengembangan kegiatan ekonomi produktif.

Program Akses Reforma Agraria (ARA) seharusnya menjadi kebijakan nasional sebagai alat untuk mencapai keadilan agraria dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa selain bentuk pengaturan kepemilikan tanah, akses ke dalam sumber daya seperti modal, teknologi, pasar dan kelembagaan merupakan kunci agar Program Reforma Agraria dapat membuahkan hasil yang nyata bagi kelompok usaha dan masyarakat (Arisaputra, 2016).

Penelitian Nurrokhman (2014), menyimpulkan bahwa sertifikat tanah merupakan salah satu syarat utama untuk mengakses modal, sebab dengan sertifikat masyarakat dapat mengajukan pinjaman modal. Legalitas aset melalui PTSL juga terbukti meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengakses lembaga keuangan dan memperkuat kepercayaan investor (Ramadhani, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Putrisasmita (2023), yang menyatakan bahwa keberhasilan Reforma Agraria sangat ditentukan oleh keberhasilan legalisasi aset melalui PTSL, karena kepastian hukum atas tanah membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses permodalan dan program pemberdayaan lainnya.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, Penataan Akses Reforma Agraria memiliki keterkaitan kuat dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM sendiri merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,9% serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (OJK Institute, 2025). Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala struktural seperti keterbatasan akses

permodalan, rendahnya literasi digital dan keuangan, serta lemahnya jaringan pemasaran (Pratiwi Putri et al., 2023; Suputra & Utama, 2022).

Keterkaitan antara pelaksanaan reforma agraria dengan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Selama ini, implementasi reforma agraria lebih banyak berfokus pada penataan aset melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset, sedangkan aspek penataan akses belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Padahal, penataan akses memiliki peran penting dalam mendukung pemanfaatan aset yang telah diterima masyarakat melalui penguatan kapasitas usaha, pengembangan kelembagaan, perluasan akses permodalan, serta jaringan pemasaran.

Studi Rohman (2019) di Desa Tahunan, Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan akses tidak berjalan optimal akibat kesenjangan antara kebijakan teoritis, panduan teknis, dan praktik pemberdayaan masyarakat. Padahal seharusnya Reforma Agraria dirancang untuk mendukung pemanfaatan lahan sebagai modal produktif melalui pendanaan, pelatihan usaha, fasilitasi pemasaran, serta integrasi usaha kecil dan mikro (Ahbar, 2021)

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, studi mengenai reforma agraria umumnya masih berfokus pada aspek legalisasi aset dan dampak kesejahteraan secara umum. Penelitian yang secara khusus mengidentifikasi potensi UMKM sebagai dasar Program Penataan Akses pada tingkat kelurahan masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan pada pendekatan identifikasi potensi UMKM berbasis lokal sebagai dasar Penataan Akses Reforma Agraria.

Hal ini dikarenakan potensi UMKM di wilayah pelaksanaan Reforma Agraria sangat beragam, keberagaman ini dipengaruhi oleh kondisi sumber daya alam, letak geografis, serta karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat di masing-masing wilayah. Sehingga, potensi usaha yang ada belum seluruhnya teridentifikasi secara mendalam dan belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan program penataan akses. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk mengetahui potensi UMKM di wilayah

penerima reforma agraria sehingga kebijakan penataan akses yang dirumuskan dapat lebih sesuai dengan kondisi lokal dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat

Mengacu dari uraian di atas, penting dan menarik kiranya dilakukan penelitian terkait dengan penataan akses. Lokasi yang akan diambil adalah Kalurahan Sitimulyo dengan pertimbangan telah dilakukannya program PTSL pada tahun 2018 dan secara umum terdapat banyak UMKM yang dapat dikembangkan di wilayah kalurahan. Daerah ini memiliki UMKM yang beragam dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai dasar strategi Penataan Akses Reforma Agraria.

Identifikasi UMKM yang dilakukan secara sistematis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi usaha yang berkembang di Kalurahan Sitimulyo, sehingga dapat menjadi dasar dalam Program Penataan Akses. Dengan demikian, Program Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada aspek legalitas kepemilikan tanah, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, akan dilaksanakan penelitian dengan judul **“Identifikasi Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Dasar Program Penataan Akses Reforma Agraria”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah Kalurahan Sitimulyo?
2. Bagaimana potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kalurahan Sitimulyo?

C. Tujuan

1. Mengidentifikasi jenis-jenis UMKM yang berada di wilayah Kalurahan Sitimulyo.
2. Mengidentifikasi potensi UMKM yang terdiri atas berbagai jenis usaha yang berada di wilayah Kalurahan Sitimulyo yang dapat direkomendasikan sebagai Program Penataan Akses Reforma Agraria.

D. Manfaat

Penelitian tentang identifikasi potensi UMKM di Kalurahan Sitimulyo diharapkan dapat memberi kontribusi penting secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memperkaya kajian ilmiah mengenai Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya identifikasi potensi UMKM sebagai dasar dalam perencanaan Program Penataan Akses yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

2. Manfaat Praktis

a. Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian ATR/BPN

Memberikan data empiris untuk mendukung penyusunan Program Penataan Akses yang lebih tepat sasaran, serta sebagai bahan masukan penguatan implementasi Program Penataan Akses Reforma Agraria khususnya pada sektor pemberdayaan ekonomi.

b. Pemerintah Kalurahan dan Pemerintah Daerah

Dengan memahami potensi UMKM yang ada di wilayah kalurahan, kedepannya dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal.

c. UMKM di Kalurahan Sitimulyo

Penelitian memberikan gambaran potensi usaha, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kapasitas dan inovasi usaha untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing UMKM lokal.

d. Mahasiswa

Menjadi referensi empiris dalam kajian Reforma Agraria dan pembangunan ekonomi lokal. Memberikan tambahan pengetahuan tentang potensi wilayah yang dapat menjadi rekomendasi Program Penataan Akses Reforma Agraria.

E. Batasan Masalah

1. UMKM yang dimaksud tidak dibatasi hanya subjek atau pelaku UMKM yang berasal atau menerima program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada identifikasi potensi UMKM yang berada di wilayah Kalurahan Sitimulyo.
3. Penelitian ini hanya menyoroti potensi UMKM sebagai dasar Program Penataan Akses.
4. UMKM diambil dari pelaku usaha representatif yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis potensi usaha pada sektor terkait. Dengan demikian, temuan yang disajikan dalam pembahasan lebih menggambarkan kondisi nyata dari salah satu contoh usaha yang mewakili karakteristik umum sektor tersebut.
5. Usaha yang dipilih merupakan usaha batu bata, emping melinjo, jamu dan konveksi atau penjahit. Pemilihan usaha ini memperhatikan pendapatan ekonomi, kemampuan menyerap tenaga kerja lokal, peluang pasar, keberlanjutan usaha, keterkaitan dengan potensi lokal

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, sebagai dasar perumusan Program Penataan Akses Reforma Agraria. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut.

1. Hasil pendataan menunjukkan terdapat 891 unit UMKM yang berkembang di Kalurahan Sitimulyo, terbagi dalam empat sektor usaha. Sektor produksi mendominasi dengan 362 unit usaha (40,6%), diikuti sektor kuliner sebanyak 218 unit (24,5%), sektor jasa sebanyak 166 unit (18,6%), dan sektor perdagangan sebanyak 145 unit (16,3%). Keberagaman jenis usaha ini mencerminkan bahwa masyarakat Kalurahan Sitimulyo memiliki kemampuan adaptif yang baik dalam memanfaatkan potensi lokal baik berupa sumber daya alam, keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun, maupun peluang pasar yang muncul dari dinamika wilayah. Dominasi sektor produksi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih berakar kuat pada pengolahan sumber daya lokal, terutama usaha batu bata yang memanfaatkan tanah liat, serta industri makanan olahan yang memanfaatkan hasil pertanian. Sementara itu, berkembangnya sektor jasa terutama usaha konveksi dan penjahit menandai pergeseran sebagian masyarakat menuju usaha berbasis keterampilan yang berorientasi pasar lebih luas.
2. Berdasarkan analisis komparatif terhadap aspek pendapatan ekonomi, kemampuan menyerap tenaga kerja lokal, peluang pasar, keberlanjutan usaha dan keterkaitan dengan potensi lokal terdapat empat jenis usaha yang direkomendasikan sebagai prioritas dalam Program Penataan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Sitimulyo. Pertama merupakan usaha konveksi/penjahit unggul dengan pendapatan bersih tertinggi (Rp34.788.000/bulan) dan pasar tak terbatas geografis berkat pemasaran

digital, namun terkendala modal awal dan harga kain yang tinggi. Kedua, emping melinjo unggul pada margin tinggi (Rp17.000.000/bulan) sebagai nilai tambah hasil pertanian lokal, tetapi terkendala fluktuasi bahan baku dan pasar yang masih lokal. Ketiga, batu bata, meski pendapatannya lebih kecil (Rp7.391.800/bulan), memiliki dampak ekonomi kolektif terluas karena jumlah pelakunya terbanyak (219 unit), namun terkendala menipisnya bahan baku tanah liat dan metode produksi tradisional. Terakhir, jamu memiliki skala terkecil (Rp5.481.750/bulan) namun berpotensi jangka panjang karena keterkaitan budaya lokal dan tren hidup sehat, terkendala daya tahan produk dan minimnya legalitas. Secara umum, seluruh usaha menghadapi tantangan bersama berupa keterbatasan pemasaran digital, minimnya legalitas usaha, dan rendahnya keberlanjutan usaha. Kebutuhan mendasarnya adalah inisiasi Program Penataan Akses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut PTSL 2018, yang dapat dilakukan melalui pelatihan maupun pemberdayaan serta bantuan dalam akses modal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut ini disampaikan saran yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Program Penataan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Sitimulyo.

1. Pemerintah Kalurahan Sitimulyo perlu melakukan pembaruan data UMKM secara berkala sebagai dasar perencanaan program pemberdayaan, sekaligus mengajukan usulan formal agar Kalurahan Sitimulyo ditetapkan sebagai lokasi sasaran Program Penataan Akses.
2. Program Desa Prima dan Desa Preneur yang telah berjalan hendaknya dioptimalkan sebagai wadah implementasi pemberdayaan UMKM dalam kerangka Penataan Akses Reforma Agraria, sehingga terjadi sinergi yang efektif antara program desa dengan program Kementerian ATR/BPN. Dengan program seperti pemberdayaan, pendampingan usaha maupun bantuan modal bagi para pelaku usaha.

3. Penelitian ini bersifat identifikasi awal sehingga terbuka ruang untuk kajian lanjutan, khususnya mengenai efektivitas implementasi Program Penataan Akses Reforma Agraria terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Sitimulyo, serta korelasi antara kepemilikan sertifikat PTSL dengan kemampuan akses permodalan pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriliyeni, Martua Sihaholo, & Rai Sita. (2021). Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(3). <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i3.834>
- Ahbar, F. K. (2021). Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat (Access reform as Community Empowerment). *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.
- Aisiyah, N., Mujiati, & Idawijayanti, T. (2025). Analisis Korelasi Peningkatan Pendapatan dan Kegiatan Reforma Agraria di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. *Jurnal Tunas Agraria*, 8 (1), 129–142.
- Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Perspektif*, 21(2). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.188>
- Arisaputra, M. I. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2).
- Ayu, I. K. (2020). Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(3). <https://doi.org/10.22146/jmh.41560>
- Diman, B., Mahendra, T., Zulfikar, Sari, Y., Desvilla, & Gustiva Ulan. (2025). Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal Di Gampong Guhang Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 1 (1)*, 41–49.
- Erlina, E., & Atikarani, N. (2019). Implikasi Hukum Program Percepatan Pendaftaran Tanah Dalam Kebijakan Reforma Agraria (Program Sertipikat Tanah Sistematis Lengkap). *Lambung Mangkurat Law Journal*, 4(1), 64–73. <https://doi.org/10.32801/abc.v4i1.79>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Habibah, N. A. (2024). Pemetaan Potensi UMKM Jawa Timur Melalui Analisis Korespondensi Untuk Pengembangan Sektor Usaha. *Setyaningrum, Idfi*, 7.
- Hermawan, I. K. D. A., & Surata, I. G. (2021). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Kertha Widya*, 8(2). <https://doi.org/10.37637/kw.v8i2.648>

- Huda, N. A. A., & Silviana, A. (2023). Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang Berkepastian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2).
- Krismantoro, D. (2023). Penguasaan Lahan Perspektif Reforma Agraria. *Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2). <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i2.54>
- Kurniawan, A., Sudibyanung, & Supriyanti, T. (2020). Pemanfaatan Sertipikat Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Modal Peningkatan Modal Usaha Di Kabupaten Madiun. *Jurnal Tunas Agraria Vol. 3 No.3*.
- Kurniawan, W. A., Setiowati, S., & Supriyanti, T. (2018). Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.1>
- Melati, Misnawati, M., Haris, T. S., Rahmadani, J., & Mutmaina, M. (2024). Analisis Potensi Dan Tantangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4).
- Mulyadi, S. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat,
- Nadila, Ghofur, A. R., & Fasa, I. M. (2025). Peran Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan: Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal E-Bis:Ekonomi Bisnis* 9 (1), 389–407.
- Nurrokhman, A. (2014). Nilai Tambah Sertipikat Tanah. *Makalah*.
- Nuryasinta, K. R., & Pangestika, P. (2025). Legalitas Aset dan Manajemen Lahan Sebagai Penguatan Reforma Agraria: Studi Peningkatan Kesejahteraan Petani Gurem. *Jurnal Tunas Agraria*, 8 (2), 236–251.
- OJK Institute. (2025). Strategi Peningkatan Skala Bisnis Menembus Pasar Nasional dan Internasional. *OJK Institute*. <https://institute.ojk.go.id>
- Primiana, I. (2009). *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Alfabeta.
- Pratiwi Putri, I., Agustin Nengsih, T., & Embun Baining, M. (2023). Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Udang Ketak Di Kecamatan Nipah Panjang. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30631/makesya.v3i1.1687>
- Putrisasmita, G. (2023). Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 3(1). <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1466>
- Rahmadita, N. A., Wibawa, B. M., & Hakim, M. S. (2018). Identifikasi Permasalahan Pemanfaatan Data sebagai Dasar Pengambilan Keputusan

- Bisnis pada UMKM Sektor Jasa: Kasus di Surabaya. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 7(1). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v7i1.28529>
- Ramadhan, R. M., & Octarina, F. N. (2022). Legalisasi Aset dalam Reforma Agraria di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8 (4).
- Ramadhani, R. (2021). Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1).
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1).
- Rohman, M. L. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4).
- Saeni, A. A., & Fauzy, A. (2023). Strategi Promosi Dalam Konten Media Sosial Mie Baraccung Makassar. *ADMIT: Jurnal Administrasi Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.33509/admit.v1i1.2030>
- Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. Rajawali Press.
- Santoso, U. (2019). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suryana. (2013). *Kewirausahaan, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Salemba Empat.
- Sukarman, H., & Iskandar, T. (2023). Efektivitas Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Tanah Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden 34 Tahun 2003 Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(1). <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.9997>
- Suputra, P. agus A. arya, & Utama, S. (2022). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Dan Akses Modal Serta Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Para Pengusaha UKM. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(2). <https://doi.org/10.24843/eep.2022.v11.i02.p09>
- Zein S. (2019). Reformasi Agraria Dari Dulu Sampai Sekarang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>

Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kelurahan Mandiri Budaya.

Petunjuk Teknis 10/JUKNIS-500.PH.01.01/I/2025 Penataan Akses Tahun 2025.